

Review Rencana Tindak Pengendalian Operasional Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2024

Penetapan Nomor : 050 / 121611 / 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PEKERJAAN UMUM

DAFTAR ISI

R	D	P	D	R	P	1	
D	P	R	M	M	P	M	1
I	P	D	1				
	r	1					
D	1						
M	d	2					
D	R	3					
II	P	7					
P	7						
P	7						
P	7						
D	P	Statement of Responsibilities	10				
III	P	D	11				
P	d	D	11				
P	d	11					
R	P	P	d	12			
I	P	R	14				
P	14						
I	R	16					
R	17						
P	D	22					
R	M	D	M	24			
P	M	25					
P	P	26					

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang baik dan transparan merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi anggaran. Rencana Tindakan Pengendalian (RTP) merupakan instrumen yang sangat penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan adanya RTP, pemerintah dapat mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin terjadi dan mengambil tindakan preventif untuk meminimalkan dampak negatif dari risiko tersebut. Hal ini akan membantu pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Dengan demikian, RTP diharapkan dapat menjadi panduan yang efektif dalam mengelola risiko operasional di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas.

B. Dasar Hukum

Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang baik dan transparan merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi anggaran. Rencana Tindakan Pengendalian (RTP) merupakan instrumen yang sangat penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan adanya RTP, pemerintah dapat mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin terjadi dan mengambil tindakan preventif untuk meminimalkan dampak negatif dari risiko tersebut. Hal ini akan membantu pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Dengan demikian, RTP diharapkan dapat menjadi panduan yang efektif dalam mengelola risiko operasional di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas.

Penerapan sistem informasi manajemen yang terintegrasi dan otomatisasi proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

Penerapan sistem manajemen risiko yang komprehensif untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko operasional secara proaktif.

Penerapan sistem manajemen mutu yang berbasis standar internasional untuk memastikan kualitas pelayanan publik yang konsisten dan memuaskan.

C. Maksud dan Tujuan

Dokumen ini bertujuan untuk menetapkan kerangka kerja, kebijakan, dan prosedur yang diperlukan untuk memastikan bahwa Dinas PU dapat mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko operasional secara efektif, sehingga dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan.

Ruang lingkup dokumen ini mencakup seluruh aktivitas operasional Dinas PU, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Dokumen ini berlaku untuk seluruh pegawai Dinas PU dan akan direvisi secara berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan regulasi, teknologi, dan kebutuhan operasional.

Ruang lingkup dokumen ini mencakup seluruh aktivitas operasional Dinas PU, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Dokumen ini berlaku untuk seluruh pegawai Dinas PU dan akan direvisi secara berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan regulasi, teknologi, dan kebutuhan operasional.

Maksud dari dokumen ini adalah untuk menetapkan kerangka kerja, kebijakan, dan prosedur yang diperlukan untuk memastikan bahwa Dinas PU dapat mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko operasional secara efektif, sehingga dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan.

Tujuan dari dokumen ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh pegawai Dinas PU memahami dan melaksanakan kebijakan dan prosedur manajemen risiko operasional yang ditetapkan, sehingga dapat meminimalkan dampak negatif dari risiko operasional yang dihadapi.

Tujuan dari dokumen ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh pegawai Dinas PU memahami dan melaksanakan kebijakan dan prosedur manajemen risiko operasional yang ditetapkan, sehingga dapat meminimalkan dampak negatif dari risiko operasional yang dihadapi.

Tujuan dari dokumen ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh pegawai Dinas PU memahami dan melaksanakan kebijakan dan prosedur manajemen risiko operasional yang ditetapkan, sehingga dapat meminimalkan dampak negatif dari risiko operasional yang dihadapi.

Tujuan dari dokumen ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh pegawai Dinas PU memahami dan melaksanakan kebijakan dan prosedur manajemen risiko operasional yang ditetapkan, sehingga dapat meminimalkan dampak negatif dari risiko operasional yang dihadapi.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup RPPD meliputi seluruh kegiatan operasional Dinas PU Th. 2024 yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PU Th. 2024. Ruang lingkup RPPD meliputi seluruh kegiatan operasional Dinas PU Th. 2024 yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PU Th. 2024.

1. Ruang Lingkup Penerimaan

Ruang lingkup penerimaan meliputi seluruh kegiatan operasional Dinas PU Th. 2024 yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PU Th. 2024. Ruang lingkup penerimaan meliputi seluruh kegiatan operasional Dinas PU Th. 2024 yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PU Th. 2024.

2. Ruang Lingkup Pengeluaran

Ruang lingkup pengeluaran meliputi seluruh kegiatan operasional Dinas PU Th. 2024 yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PU Th. 2024. Ruang lingkup pengeluaran meliputi seluruh kegiatan operasional Dinas PU Th. 2024 yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PU Th. 2024.

3. Ruang Lingkup Penjualan

Ruang lingkup penjualan meliputi seluruh kegiatan operasional Dinas PU Th. 2024 yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PU Th. 2024. Ruang lingkup penjualan meliputi seluruh kegiatan operasional Dinas PU Th. 2024 yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PU Th. 2024.

4. Ruang Lingkup Investasi

Ruang lingkup investasi meliputi seluruh kegiatan operasional Dinas PU Th. 2024 yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PU Th. 2024. Ruang lingkup investasi meliputi seluruh kegiatan operasional Dinas PU Th. 2024 yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PU Th. 2024.

5. Ruang Lingkup Lain-lain

Ruang lingkup lain-lain meliputi seluruh kegiatan operasional Dinas PU Th. 2024 yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PU Th. 2024. Ruang lingkup lain-lain meliputi seluruh kegiatan operasional Dinas PU Th. 2024 yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PU Th. 2024.

...r...P...r...P...d...
...d...P...d...
...D...d...d...
...D...I...P...
...d...P...d...
...D...r...Pr...d...
D...P...r...r...

I PR RMP M R D IR D

P...D...P...
d...D...
P...d...P...
P...P...
P...d...P...Pr...d...
D...r...d...D...
R...r...P...
r...d...P...r...P...

II PR RMP D P M I M DR I

P...d...P...D...
d...D...
P...Dr...P...
R...Dr...P...
r...d...P...Dr...

III PR RMP D

P...r...d...D...
P...M...d...IM...
P...P...M...IM...
P...P...d...IM...
P...P...d...P...
P...d...D...
P...d...P...D...

I PR RMP D I

P...P...d...D...
...

II. SEKILAS TENTANG SPIP

A. Pengertian

Maksud dari SPIP adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan melaporkan risiko operasional yang dihadapi perusahaan. SPIP adalah bagian integral dari sistem manajemen risiko perusahaan yang bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan dapat beroperasi secara efektif dan efisien dengan risiko yang dapat diterima. SPIP juga membantu perusahaan dalam memahami risiko yang dihadapi perusahaan, menilai dampak potensial dari risiko tersebut, dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengelola risiko tersebut. SPIP juga membantu perusahaan dalam memastikan bahwa perusahaan telah mematuhi persyaratan yang ditetapkan oleh regulator.

Dalam SPIP, risiko operasional didefinisikan sebagai risiko yang timbul dari kegagalan atau ketidakefektifan proses internal perusahaan, termasuk risiko yang timbul dari kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau peristiwa alam. Risiko operasional dapat berdampak negatif terhadap kinerja perusahaan, reputasi perusahaan, dan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki SPIP yang efektif untuk mengelola risiko operasional tersebut. SPIP yang efektif dapat membantu perusahaan dalam mengurangi dampak negatif dari risiko operasional, meningkatkan efisiensi operasi, dan memastikan bahwa perusahaan telah mematuhi persyaratan yang ditetapkan oleh regulator. SPIP juga dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan.

B. Tujuan SPIP

Pada dasarnya, SPIP bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan dapat beroperasi secara efektif dan efisien dengan risiko yang dapat diterima. SPIP juga bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan telah mematuhi persyaratan yang ditetapkan oleh regulator. SPIP juga dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan.

C. Unsur-unsur SPIP

Pada dasarnya, SPIP terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas SPIP. Lingkungan pengendalian meliputi budaya perusahaan, struktur organisasi, dan sumber daya manusia. Lingkungan pengendalian yang kuat dapat membantu perusahaan dalam memastikan bahwa SPIP berjalan dengan efektif.

pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu “*tone at the top*” yang dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perilaku dan sikap seluruh pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan demikian, *tone at the top* (penentu “irama” organisasi).

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menilai risiko yang dihadapi organisasi, dengan tujuan untuk memahami risiko yang dihadapi organisasi, menentukan risiko mana yang harus diutamakan, dan menentukan tindakan yang harus diambil untuk mengelola risiko tersebut. Penilaian risiko dapat dilakukan secara kualitatif atau kuantitatif. Penilaian risiko kualitatif menggunakan skala yang didasarkan pada pengalaman dan penilaian ahli, sedangkan penilaian risiko kuantitatif menggunakan data statistik dan model matematika. Penilaian risiko dapat dilakukan secara berkala atau secara terus-menerus. Penilaian risiko yang dilakukan secara berkala bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang baru muncul atau risiko yang sudah ada yang berubah. Penilaian risiko yang dilakukan secara terus-menerus bertujuan untuk memantau risiko yang sudah ada dan memastikan bahwa risiko tersebut tetap berada pada tingkat yang dapat diterima. Penilaian risiko yang dilakukan secara berkala atau secara terus-menerus dapat membantu organisasi untuk mengidentifikasi risiko yang dihadapi, memahami risiko tersebut, dan menentukan tindakan yang harus diambil untuk mengelola risiko tersebut. Penilaian risiko yang dilakukan secara berkala atau secara terus-menerus dapat membantu organisasi untuk mengidentifikasi risiko yang dihadapi, memahami risiko tersebut, dan menentukan tindakan yang harus diambil untuk mengelola risiko tersebut. Penilaian risiko yang dilakukan secara berkala atau secara terus-menerus dapat membantu organisasi untuk mengidentifikasi risiko yang dihadapi, memahami risiko tersebut, dan menentukan tindakan yang harus diambil untuk mengelola risiko tersebut.

3. Kegiatan Pengendalian

Salah satu kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh Dinas PU Th. 2024 adalah melakukan kegiatan pengendalian risiko operasional. Kegiatan ini dilakukan dengan cara melakukan identifikasi risiko, penilaian risiko, dan pelaksanaan rencana pengendalian risiko. Kegiatan ini dilakukan secara berkala dan melibatkan seluruh pegawai. Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi risiko operasional yang dihadapi oleh Dinas PU Th. 2024. Kegiatan ini dilakukan dengan cara melakukan identifikasi risiko, penilaian risiko, dan pelaksanaan rencana pengendalian risiko. Kegiatan ini dilakukan secara berkala dan melibatkan seluruh pegawai. Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi risiko operasional yang dihadapi oleh Dinas PU Th. 2024. Kegiatan ini dilakukan dengan cara melakukan identifikasi risiko, penilaian risiko, dan pelaksanaan rencana pengendalian risiko. Kegiatan ini dilakukan secara berkala dan melibatkan seluruh pegawai. Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi risiko operasional yang dihadapi oleh Dinas PU Th. 2024.

4. Informasi dan Komunikasi

Salah satu kegiatan informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh Dinas PU Th. 2024 adalah melakukan kegiatan informasi dan komunikasi risiko operasional. Kegiatan ini dilakukan dengan cara melakukan identifikasi risiko, penilaian risiko, dan pelaksanaan rencana pengendalian risiko. Kegiatan ini dilakukan secara berkala dan melibatkan seluruh pegawai. Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi risiko operasional yang dihadapi oleh Dinas PU Th. 2024. Kegiatan ini dilakukan dengan cara melakukan identifikasi risiko, penilaian risiko, dan pelaksanaan rencana pengendalian risiko. Kegiatan ini dilakukan secara berkala dan melibatkan seluruh pegawai. Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi risiko operasional yang dihadapi oleh Dinas PU Th. 2024.

5. Pemantauan Berkelanjutan

Salah satu kegiatan pemantauan berkelanjutan yang dilakukan oleh Dinas PU Th. 2024 adalah melakukan kegiatan pemantauan berkelanjutan risiko operasional. Kegiatan ini dilakukan dengan cara melakukan identifikasi risiko, penilaian risiko, dan pelaksanaan rencana pengendalian risiko. Kegiatan ini dilakukan secara berkala dan melibatkan seluruh pegawai. Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi risiko operasional yang dihadapi oleh Dinas PU Th. 2024. Kegiatan ini dilakukan dengan cara melakukan identifikasi risiko, penilaian risiko, dan pelaksanaan rencana pengendalian risiko. Kegiatan ini dilakukan secara berkala dan melibatkan seluruh pegawai. Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi risiko operasional yang dihadapi oleh Dinas PU Th. 2024.

D. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibilities) adalah pernyataan yang dibuat oleh pejabat atau karyawan yang menunjukkan tanggung jawab mereka terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada mereka. Pernyataan ini dibuat sebagai dasar untuk menetapkan standar kinerja yang harus dicapai dan sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan pelaksanaan tugas tersebut. Pernyataan Tanggung Jawab juga berfungsi sebagai alat komunikasi yang efektif antara atasan dan bawahan, serta sebagai dasar untuk memberikan pembinaan dan pengembangan karir.

Pernyataan Tanggung Jawab yang baik harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu: jelas, spesifik, terukur, dapat dicapai, dan realistis. Pernyataan ini harus mencakup informasi tentang tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang akan diukur. Selain itu, pernyataan juga harus mencakup informasi tentang sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Pernyataan Tanggung Jawab yang baik juga harus dibuat secara partisipatif, artinya melibatkan bawahan dalam proses penyusunan pernyataan tersebut. Hal ini akan meningkatkan komitmen dan tanggung jawab bawahan terhadap pelaksanaan tugasnya.

Respon terhadap pernyataan tanggung jawab yang baik akan meningkatkan motivasi dan kinerja bawahan. Sebaliknya, pernyataan yang tidak jelas atau tidak realistis akan menimbulkan kebingungan dan frustrasi. Oleh karena itu, atasan harus memperhatikan kualitas pernyataan tanggung jawab yang dibuat oleh bawahan. Pernyataan Tanggung Jawab yang baik akan menjadi dasar untuk memberikan pembinaan dan pengembangan karir yang efektif.

III. LINGKUNGAN PENGENDALIAN

A. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

Organisasi harus memastikan bahwa lingkungan pengendalian yang diharapkan mendukung tercapainya tujuan organisasi. Lingkungan pengendalian yang diharapkan meliputi budaya organisasi, kompetensi sumber daya manusia, integritas, struktur organisasi, dan sistem informasi. Organisasi harus memastikan bahwa lingkungan pengendalian yang diharapkan mendukung tercapainya tujuan organisasi. Lingkungan pengendalian yang diharapkan meliputi budaya organisasi, kompetensi sumber daya manusia, integritas, struktur organisasi, dan sistem informasi. Organisasi harus memastikan bahwa lingkungan pengendalian yang diharapkan mendukung tercapainya tujuan organisasi. Lingkungan pengendalian yang diharapkan meliputi budaya organisasi, kompetensi sumber daya manusia, integritas, struktur organisasi, dan sistem informasi.

Organisasi harus memastikan bahwa lingkungan pengendalian yang diharapkan mendukung tercapainya tujuan organisasi.

1. Organisasi harus memastikan bahwa lingkungan pengendalian yang diharapkan mendukung tercapainya tujuan organisasi.
2. Organisasi harus memastikan bahwa lingkungan pengendalian yang diharapkan mendukung tercapainya tujuan organisasi.
3. Organisasi harus memastikan bahwa lingkungan pengendalian yang diharapkan mendukung tercapainya tujuan organisasi.
4. Organisasi harus memastikan bahwa lingkungan pengendalian yang diharapkan mendukung tercapainya tujuan organisasi.
5. Organisasi harus memastikan bahwa lingkungan pengendalian yang diharapkan mendukung tercapainya tujuan organisasi.
6. Organisasi harus memastikan bahwa lingkungan pengendalian yang diharapkan mendukung tercapainya tujuan organisasi.
7. Organisasi harus memastikan bahwa lingkungan pengendalian yang diharapkan mendukung tercapainya tujuan organisasi.
8. Organisasi harus memastikan bahwa lingkungan pengendalian yang diharapkan mendukung tercapainya tujuan organisasi.

B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Organisasi harus memastikan bahwa lingkungan pengendalian yang diharapkan mendukung tercapainya tujuan organisasi. Kondisi lingkungan pengendalian saat ini meliputi budaya organisasi, kompetensi sumber daya manusia, integritas, struktur organisasi, dan sistem informasi. Organisasi harus memastikan bahwa lingkungan pengendalian yang diharapkan mendukung tercapainya tujuan organisasi. Kondisi lingkungan pengendalian saat ini meliputi budaya organisasi, kompetensi sumber daya manusia, integritas, struktur organisasi, dan sistem informasi.

No	Sub Unsur	Kondisi
1	Pengendalian internal	Mendukung
2	Struktur organisasi	Mendukung
3	Keahlian sumber daya manusia	Mendukung
4	Integritas	Mendukung
5	Pengendalian risiko	Mendukung
6	Pengendalian risiko	Mendukung

No	Sub Unsur	Kondisi
1	Penerapan prosedur kerja yang terdapat dalam dokumen prosedur kerja	Mampu
2	Penerapan prosedur kerja yang terdapat dalam dokumen prosedur kerja	Mampu

1. Penerapan prosedur kerja yang terdapat dalam dokumen prosedur kerja

1.

Penerapan prosedur kerja yang terdapat dalam dokumen prosedur kerja

Penerapan prosedur kerja yang terdapat dalam dokumen prosedur kerja

Penerapan prosedur kerja yang terdapat dalam dokumen prosedur kerja

Penerapan prosedur kerja yang terdapat dalam dokumen prosedur kerja

Penerapan prosedur kerja yang terdapat dalam dokumen prosedur kerja

Penerapan prosedur kerja yang terdapat dalam dokumen prosedur kerja

Penerapan

C. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Penerapan prosedur kerja yang terdapat dalam dokumen prosedur kerja

Penerapan prosedur kerja yang terdapat dalam dokumen prosedur kerja

Penerapan prosedur kerja yang terdapat dalam dokumen prosedur kerja

No	Sub Unsur	Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan Pengendalian
I	Penerapan prosedur kerja yang terdapat dalam dokumen prosedur kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan prosedur kerja yang terdapat dalam dokumen prosedur kerja - Penerapan prosedur kerja yang terdapat dalam dokumen prosedur kerja - Penerapan prosedur kerja yang terdapat dalam dokumen prosedur kerja - Penerapan prosedur kerja yang terdapat dalam dokumen prosedur kerja - Penerapan prosedur kerja yang terdapat dalam dokumen prosedur kerja - Penerapan prosedur kerja yang terdapat dalam dokumen prosedur kerja
II	Penerapan prosedur kerja yang terdapat dalam dokumen prosedur kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan prosedur kerja yang terdapat dalam dokumen prosedur kerja - Penerapan prosedur kerja yang terdapat dalam dokumen prosedur kerja - Penerapan prosedur kerja yang terdapat dalam dokumen prosedur kerja - Penerapan prosedur kerja yang terdapat dalam dokumen prosedur kerja - Penerapan prosedur kerja yang terdapat dalam dokumen prosedur kerja - Penerapan prosedur kerja yang terdapat dalam dokumen prosedur kerja

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur SDA dan bangunan pengaman pantai, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, Dinas PU Kabupaten/Kota akan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur SDA dan bangunan pengaman pantai.
- 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- 3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur SDA dan bangunan pengaman pantai.
- 4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur SDA dan bangunan pengaman pantai.
- 5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur SDA dan bangunan pengaman pantai.
- 6. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur SDA dan bangunan pengaman pantai.
- 7. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur SDA dan bangunan pengaman pantai.

NO	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	Indikator Kinerja
1	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas areal irigasi yang di kelola
2	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur SDA yang dikelola
3	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Sistem Drainase yang dikelola/dikembangkan
4	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang dilatih
5	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah bangunan gedung Pemerintah Daerah yang dikelola
6	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Luas lingkungan bangunan gedung pemda yang dikelola / ditata
7	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan Kabupaten Yang dibangun/Ditingkatkan Kondisinya

Rencana kegiatan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur SDA dan bangunan pengaman pantai, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, Dinas PU Kabupaten/Kota akan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
9	Kurang optimalnya Rehabilitasi Jaringan Irigasi akibat Kerusakan jaringan tinggi, prioritas anggaran, SDM yang belum sesuai kebutuhan	ROO.24	103	6	6	3,10	3,00	9,30
10	Operasi dan Pemeliharaan Irigasi kurang maksimal karena belum memenuhi AKNPI	ROO.24	103	6	6	3,00	3,00	9,00
11	Belum tercukupinya kebutuhan Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi	ROO.24	103	6	6	2,80	2,90	8,12
12	Kurang optimalnya Rehabilitasi Jaringan Irigasi akibat Kerusakan jaringan tinggi, prioritas anggaran, SDM yang belum sesuai kebutuhan	ROO.24	103	6	6	3,10	3,20	9,92
13	Operasi dan Pemeliharaan Irigasi kurang maksimal karena belum memenuhi AKNPI	ROO.24	103	6	6	3,00	3,00	9,00
14	Terhambatnya pelaksanaan pekerjaan Fisik Bangunan Gedung akibat kesalahan dalam tahapan perencanaan (Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Serta Perencanaan Teknis)	ROO.24	103	6	6	2,80	2,80	7,84
15	Kurang optimalnya Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	ROO.24	103	6	6	2,90	3,00	8,70
16	Bangunan gedung pemerintah tidak terpelihara dengan baik	ROO.24	103	6	6	3,00	2,90	8,70
17	Terhambatnya pelaksanaan pekerjaan Fisik Jalan akibat kesalahan dalam tahapan perencanaan (Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan)	ROO.24	103	6	6	2,80	2,80	7,84
18	Terbatasnya ketersediaan lahan untuk pembangunan/peningkatan jalan	ROO.24	103	6	6	2,80	2,90	8,12
19	Kurangnya Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan	ROO.24	103	6	6	2,80	2,80	7,84
20	Kurangnya jumlah peserta dalam pelatihan tenaga terampil dalam pelatihan / pembinaan Jasa konstruksi	ROO.24	103	6	6	2,90	2,80	8,12

3. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan

1. Apakah pengendalian yang ada sudah memadai untuk mengurangi risiko ke tingkat yang dapat diterima? Jika tidak, apa saja kelemahan utamanya?

2. Apakah pengendalian yang ada sudah mencakup seluruh risiko yang signifikan? Jika tidak, apa saja risiko yang belum teridentifikasi atau terabaikan?

3. Apakah pengendalian yang ada sudah efektif dalam mencegah terjadinya risiko? Bagaimana bukti-bukti yang mendukung hal tersebut?

4. Apakah pengendalian yang ada sudah efisien dalam hal biaya dan sumber daya? Bagaimana cara untuk meningkatkan efisiensi pengendalian?

5. Apakah pengendalian yang ada sudah sesuai dengan standar yang berlaku? Bagaimana cara untuk memastikan kepatuhan terhadap standar?

6. Apakah pengendalian yang ada sudah dapat diandalkan dalam jangka panjang? Bagaimana cara untuk memastikan keberlanjutan pengendalian?

7. Apakah pengendalian yang ada sudah dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen lainnya? Bagaimana cara untuk meningkatkan integrasi?

8. Apakah pengendalian yang ada sudah dapat diukur dan dimonitor? Bagaimana cara untuk meningkatkan pengukuran dan pemantauan?

9. Apakah pengendalian yang ada sudah dapat diadaptasi terhadap perubahan? Bagaimana cara untuk meningkatkan kemampuan adaptasi?

10. Apakah pengendalian yang ada sudah dapat diinformasikan kepada pihak-pihak yang terkait? Bagaimana cara untuk meningkatkan komunikasi?

4. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

1. Bagaimana cara untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang signifikan yang perlu ditindaklanjuti?

2. Bagaimana cara untuk menentukan prioritas tindakan pengendalian yang harus dilakukan?

3. Bagaimana cara untuk menetapkan tanggung jawab dan peran masing-masing pihak dalam melaksanakan tindakan pengendalian?

4. Bagaimana cara untuk menetapkan tenggat waktu dan jadwal pelaksanaan tindakan pengendalian?

5. Bagaimana cara untuk mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tindakan pengendalian?

6. Bagaimana cara untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan tindakan pengendalian?

7. Bagaimana cara untuk melaporkan hasil pelaksanaan tindakan pengendalian kepada pihak-pihak yang terkait?

8. Bagaimana cara untuk memastikan bahwa tindakan pengendalian yang telah dilaksanakan sudah efektif dalam mengurangi risiko?

9. Bagaimana cara untuk memastikan bahwa tindakan pengendalian yang telah dilaksanakan sudah efisien dalam hal biaya dan sumber daya?

10. Bagaimana cara untuk memastikan bahwa tindakan pengendalian yang telah dilaksanakan sudah sesuai dengan standar yang berlaku?

11. Bagaimana cara untuk memastikan bahwa tindakan pengendalian yang telah dilaksanakan sudah dapat diandalkan dalam jangka panjang?

12. Bagaimana cara untuk memastikan bahwa tindakan pengendalian yang telah dilaksanakan sudah dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen lainnya?

13. Bagaimana cara untuk memastikan bahwa tindakan pengendalian yang telah dilaksanakan sudah dapat diukur dan dimonitor?

14. Bagaimana cara untuk memastikan bahwa tindakan pengendalian yang telah dilaksanakan sudah dapat diadaptasi terhadap perubahan?

15. Bagaimana cara untuk memastikan bahwa tindakan pengendalian yang telah dilaksanakan sudah dapat diinformasikan kepada pihak-pihak yang terkait?

...d...d...r...r...
...d...d...

M...d...r...
...P...P...PP...PP...P...
P...P...d...d...

P...d...d...d...P...d...d...d...
...

P...r...r...

M...d...r...r...d...

M...d...r...r...r...d...
...

d...d...D...P...r...
...r...d...
...d...d...d...
...R...P...r...
...d...r...r...d...r...r...
d...

VI. INFORMASI DAN KOMUNIKASI

- Informasi dan komunikasi merupakan salah satu elemen penting dalam manajemen risiko operasional. Untuk memastikan informasi yang relevan dapat diakses dan dipahami oleh seluruh pihak yang terkait, diperlukan kebijakan dan prosedur yang jelas.
- Informasi dan komunikasi harus dikelola secara sistematis dan terintegrasi dengan proses manajemen risiko operasional.
 - Pihak-pihak yang terkait harus diidentifikasi dan dihubungkan dengan informasi yang relevan.
 - Informasi dan komunikasi harus disampaikan secara tepat waktu, akurat, dan mudah dipahami.
 - Pihak-pihak yang terkait harus diberi akses yang memadai untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
 - Informasi dan komunikasi harus dikelola secara transparan dan akuntabel.
 - Pihak-pihak yang terkait harus diberi kesempatan untuk menyampaikan informasi dan komunikasi yang relevan.
 - Informasi dan komunikasi harus dikelola secara berkelanjutan.

VII. PEMANTAUAN

Pada pelaksanaan kegiatan ini, diidentifikasi beberapa risiko yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan. Untuk meminimalkan risiko tersebut, perlu dilakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan. Pemantauan dilakukan dengan cara memeriksa dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan kegiatan, serta mengidentifikasi dan melaporkan masalah yang timbul.

Pada pelaksanaan kegiatan ini, diidentifikasi beberapa risiko yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan.

Risiko yang diidentifikasi adalah risiko keterbatasan sumber daya manusia dan risiko keterbatasan anggaran.

Pada pelaksanaan kegiatan ini, diidentifikasi beberapa risiko yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan. Untuk meminimalkan risiko tersebut, perlu dilakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan. Pemantauan dilakukan dengan cara memeriksa dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan kegiatan, serta mengidentifikasi dan melaporkan masalah yang timbul. Risiko yang diidentifikasi adalah risiko keterbatasan sumber daya manusia dan risiko keterbatasan anggaran. Untuk meminimalkan risiko tersebut, perlu dilakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan. Pemantauan dilakukan dengan cara memeriksa dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan kegiatan, serta mengidentifikasi dan melaporkan masalah yang timbul.

Pada pelaksanaan kegiatan ini, diidentifikasi beberapa risiko yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, diidentifikasi beberapa risiko yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan. Untuk meminimalkan risiko tersebut, perlu dilakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan. Pemantauan dilakukan dengan cara memeriksa dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan kegiatan, serta mengidentifikasi dan melaporkan masalah yang timbul. Risiko yang diidentifikasi adalah risiko keterbatasan sumber daya manusia dan risiko keterbatasan anggaran. Untuk meminimalkan risiko tersebut, perlu dilakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan. Pemantauan dilakukan dengan cara memeriksa dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan kegiatan, serta mengidentifikasi dan melaporkan masalah yang timbul.

□

VIII. PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Operasional Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2024 merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh Pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dokumen Review Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Operasional yang merupakan tindak lanjut LHP Inspektorat Kabupaten Banyumas terhadap RTP Strategis Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2024 ini menjadi *instrument* untuk merencanakan sekaligus memantau capaian perbaikan/ pembangunan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Komitmen dari segenap manajemen dan seluruh pegawai serta ditunjang manajemen yang profesional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Purwokerto, 10 Juni 2024

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Banyumas**



KRESNAWAN WAHYU KRISTOYO, ST., M.Si.

NIP. 19671229 199002 1 002

No	Pertanyaan/ Kuisiонер																																									
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc	2	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	2	4	3	4	2	3	3	3	3	3	
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	4	3	4	2	3	3	3	3	3	3	
E																																										
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	
3	Kewenangan direviu secara periodik	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	4	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	
F																																										
1	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	1	2	3	3	4	3	3	3	3	2	2	2	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	
2	OPD telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	1	2	4	1	4	2	3	3	3	3	3	3
3	OPD telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	2	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	2	3	3	4	3	3	4	3	2	2	2	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	2	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3
5	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3
6	OPD telah menginternalisasi budaya sadar risiko	3	3	3	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4	3	4	2	3	3	3	3	3	3	

LAMPIRAN I
 RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
 DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
 TAHUN 2024

REKAPITULASI HASIL KUISIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERNCONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

No	Pertanyaan/ Kuisisioner	JAWABAN KORESPONDED (R)																																											
		R41	R42	R43	R44	R45	R46	R47	R48	R49	R50	R51	R52	R53	R54	R55	R56	R57	R58	R59	R60	R61	R62	R63	R64	R65	R66	R67	R68	R69	R70	R71	R72	R73	R74	R75	R76	R77	R78	R79	R80	R81			
A		PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA																																											
1	Pemkab/OPD telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	1	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	2	3	3	4	2	2	3	4	3	3	4	4			
2	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam OPD yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4
4	Pegawai mendapatkan pesan integritas dan nilai etika secara rutin dari pimpinan Pemkab/OPD (misalnya keteladanan, pesan moral dll)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4	2	2	3	3	3	3	3	4	3	
B		KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI																																											
1	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
2	OPD telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	4	3	
3	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2	2	3	2	3	2	3	2	3	3	4	4	3	3	4		
4	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	2	2	3	2	4	2	3	3	3	2	4	4	3			
C		KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF																																											

No	Pertanyaan/ Kuisiener	JAWABAN KORESPONDED (R)																																																		
		R41	R42	R43	R44	R45	R46	R47	R48	R49	R50	R51	R52	R53	R54	R55	R56	R57	R58	R59	R60	R61	R62	R63	R64	R65	R66	R67	R68	R69	R70	R71	R72	R73	R74	R75	R76	R77	R78	R79	R80	R81										
1	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3						
2	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	
3	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	4	4	3
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3		
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4		
6	Rencana/sasaran strategis Pemda telah dijabarkan kedalam sasaran OPD dan tingkat operasional OPD	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	4		
7	Rencana strategis dan rencana kerja OPD telah menyajikan informasi mengenai risiko	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	
D	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN																																																			
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	1		
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4		

No	Pertanyaan/ Kuisiонер	JAWABAN KORESPONDED (R)																																															
		R41	R42	R43	R44	R45	R46	R47	R48	R49	R50	R51	R52	R53	R54	R55	R56	R57	R58	R59	R60	R61	R62	R63	R64	R65	R66	R67	R68	R69	R70	R71	R72	R73	R74	R75	R76	R77	R78	R79	R80	R81							
7	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3		
G	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF																																																
1	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	
2	Inspektorat Daerah melakukan reuiu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3
3	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3
5	Inspektorat Daerah melakukan reuiu atas kepatuhan hukum dan aturan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	
H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT																																																
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (Inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3

LAMPIRAN I
 RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
 DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
 TAHUN 2024

REKAPITULASI HASIL KUISIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERNCONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

No	Pertanyaan/ Kuisisioner	KESIMPULAN KUOSIONER CEE																									
		R82	R83	R84	R85	R86	R87	R88	R89	R90	R91	R92	R93	R94	R95	R96	R97	R98	R99	R100	R101	R102	R103	R104	R105	Modus	
A		Memadai																									
1	Pemkab/OPD telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	Memadai
2	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam OPD yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
4	Pegawai mendapatkan pesan integritas dan nilai etika secara rutin dari pimpinan Pemkab/OPD (misalnya keteladanan, pesan moral dll)	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
B		Memadai																									
1	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	Memadai
2	OPD telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
3	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	Memadai
4	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	Memadai
C		Memadai																									

No	Pertanyaan/ Kuisisioner																									KESIMPULAN KUOSIONER CEE	
		R82	R83	R84	R85	R86	R87	R88	R89	R90	R91	R92	R93	R94	R95	R96	R97	R98	R99	R100	R101	R102	R103	R104	R105		Modus
7	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
G																										Memadai	
1	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
2	Inspektorat Daerah melakukan reuiu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	Memadai
3	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
4	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	Memadai
5	Inspektorat Daerah melakukan reuiu atas kepatuhan hukum dan aturan	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	Memadai
H																										Memadai	
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	Memadai
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (Inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	Memadai

**Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern
Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Banyumas**

NO	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
1	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA	Kurang Memadai	- Terdapat 24 risiko Fraud pada Dinas Pekerjaan Umum, meliputi Risiko Benturan kepentingan = 8; Risiko Gratifikasi = 2; Risiko Penggelapan Dalam Jabatan = 1; Risiko Suap Menyuap = 1; Risiko Perbuatan Curang = 1; Risiko Perbuatan Merugikan Negara = 1;	Memadai		Kurang Memadai	- Terdapat 24 risiko Fraud pada Dinas Pekerjaan Umum, meliputi Risiko Benturan kepentingan = 8; Risiko Gratifikasi = 2; Risiko Penggelapan Dalam Jabatan = 1; Risiko Suap Menyuap = 1; Risiko Perbuatan Curang = 1; Risiko Perbuatan Merugikan Negara = 1;
2	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI	-	-	Memadai		-	
3	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF	Memadai	- Capaian nilai SAKIP DPU masih belum konsisten, yaitu pada tahun 2021 sebesar 86,754 lalu turun pada tahun 2022 menjadi 82,65 dan naik lagi pada tahun 2023 menjadi 86,754.	Memadai		Memadai	- Capaian nilai SAKIP DPU masih belum konsisten, yaitu pada tahun 2021 sebesar 86,754 lalu turun pada tahun 2022 menjadi 82,65 dan naik lagi pada tahun 2023 menjadi 86,754.
4	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN	-	-	Memadai		-	
5	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT	-	-	Memadai		-	
6	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	Memadai		-	
7	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF	Kurang Memadai	- Dokumen RTP masih belum tersusun sesuai ketentuan - Lingkungan Pengendalian Belum Sepenuhnya Tepat; Identifikasi Risiko Kecurangan dan Kemitraan belum Optimal; Selera Kebijakan berdasarkan Sampling; Rencana atau Jadwal kegiatan Informasi dan komunikasi serta pemantauan belum tepat; Keterlambatan penyusunan dan penetapan RTP;	Memadai		Kurang Memadai	- Dokumen RTP masih belum tersusun sesuai ketentuan - Lingkungan Pengendalian Belum Sepenuhnya Tepat; Identifikasi Risiko Kecurangan dan Kemitraan belum Optimal; Selera Kebijakan berdasarkan Sampling; Rencana atau Jadwal kegiatan Informasi dan komunikasi serta pemantauan belum tepat; Keterlambatan penyusunan dan penetapan RTP;
8	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT	-	-	Memadai		-	

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL
Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Banyumas

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2024
Periode Yang dinilai	: RD 2024-2026
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
OPD yang Dinilai	: DPU
Sumber Data	: Renstra 2024-2026
Tujuan Strategis	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program OPD (Renja 2022) dan Kegiatan Utama	1. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
	a. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	b. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	2. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
	a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
	3. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
	a. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
	4. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
	a. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
	5. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
	a. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
	6. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	a. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
	7. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
	d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Keluaran/Hasil Kegiatan	Jumlah Bangunan Air Baku ditangani Target: 1 Unit
	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun Target: 5 KM
	Persentase jaringan irigasi Primer dalam kondisi baik Target: 76.81 %
	Persentase jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik Target: 86.42 %
	Panjang Drainase yang dibangun ditingkatkan dan dipelihara Target: 3 KM
	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik Target: 63.10 %
	Persentase jumlah kawasan strategis yang tertata Target: 66.67 %
	Panjang jalan kabupaten dibangun ditingkatkan dan dipelihara Target: 133 KM
	Jalur evakuasi dalam kondisi baik Target: 33.858 KM
	Jumlah Pembinaan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan Target: 2 Keg
	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Target: 4 Dokumen
	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Target: 12 Dokumen
	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Target: 12 Laporan
	Jumlah laporan pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Target: 2 Laporan
Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Target: 1 Laporan	
Jumlah laporan pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Target: 1 Laporan	
Informasi Lain	-

Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian	Kegiatan	Indikator
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun Target: 5 KM
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jaringan irigasi Primer dalam kondisi baik Target: 76.81 %
		Persentase jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik Target: 86.42 %
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Drainase yang dibangun ditingkatkan dan dipelihara Target: 3 KM
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik Target: 63.10 %
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah kawasan strategis yang tertata Target: 66.67 %
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan kabupaten dibangun ditingkatkan dan dipelihara Target: 133 KM
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalur evakuasi dalam kondisi baik Target: 33.858 KM
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pembinaan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan Target: 2 Keg

Purwokerto, 10 Juni 2024

KEPALA DPU

KABUPATEN BANYUMAS



KRESNAWAN WAHYU KRISTOYO, ST., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19671229 199002 1 002

Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten
 Nama OPD : Dinas Pekerjaan Umum
 Tahun Penilaian :
 Periode yang dinilai : 2024
 Tujuan Strategis :
 Sasaran strategis OPD :
 Urusan Pemerintahan : Urusan Urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan
 OPD yang Dinilai : Dinas Pekerjaan Umum

Jenis	NO	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD
					Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
Tujuan		Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
Ind Tujuan				Kinerja infrastruktur PUPR di Dinas PU									
Sasaran		Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
Ind Sasaran				Tingkat kemandapan jalan kabupaten kota									
Ind Sasaran				Persentase wilayah yang terhubung jaringan jalan kondisi mantap									
Program		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN											
Ind Program				Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik									
Kegiatan		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota											
Ind Kegiatan				Panjang jalan kabupaten dibangun ditingkatkan dan dipelihara	Kurangnya Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan	103	10303001	kerusakan jalan tinggi dan sporadis; SDM (pengamat jalan) terbatas;	Internal	C	Kegiatan masyarakat terganggu	Kepala Dinas PU; Bidang PPJ, Bidang PMJ, Masyarakat	DPU
Ind Kegiatan				Panjang jalan kabupaten dibangun ditingkatkan dan dipelihara	Terbatasnya ketersediaan lahan untuk pembangunan/peningkatan jalan	103	10303001	Lahan milik Pemda terbatas; Mayoritas jalan berada di antara lahan warga.	Internal	C	Mayarakat tertunda untuk mendapatkan layanan transportasi	Kepala Dinas PU; Bidang PPJ, Bidang PMJ, Masyarakat	DPU

Jenis	NO	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD
					Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
Ind Kegiatan				Panjang jalan kabupaten dibangun ditingkatkan dan dipelihara	Terhambatnya pelaksanaan pekerjaan Fisik Jalan akibat kesalahan dalam tahapan perencanaan (Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan)	103	10303001	Kurang teliti, terbatasnya tenaga teknis/SDM yang ahli, dukungan sarpras yang kurang memadai, Overload pekerjaan.	Internal	C	Banyaknya kendala dalam pelaksanaan, Evaluasi, pelaporan	Kepala Dinas PU; Bidang PPJ, Bidang PMJ, Masyarakat	DPU
Program		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE											
Ind Program				Persentase drainase jalan dalam kondisi baik									
Kegiatan		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota											
Ind Kegiatan				Panjang Drainase yang dibangun ditingkatkan dan dipelihara	Belum tercukupinya kebutuhan Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	103	10303001	Data Masterplan Drainase yang ada perlu direview; Kurang teliti, terbatasnya tenaga teknis/SDM yang ahli, dukungan sarpras yang kurang memadai, Overload pekerjaan.	Internal	C	Banyak kendala dalam pelaksanaan, Evaluasi, pelaporan	Kepala Dinas PU; Bidang Drakon, Masyarakat	DPU
Ind Kegiatan				Panjang Drainase yang dibangun ditingkatkan dan dipelihara	Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan masih belum mampu mengurangi luas genangan	103	10303001	Lokasi pekerjaan Drainase yang disurvey tidak sesuai dengan lokasi yang diusulkan masyarakat	Internal	C	Meningkatnya wilayah genangan	Kepala Dinas PU; Bidang Drakon, Masyarakat	DPU
Ind Kegiatan				Panjang Drainase yang dibangun ditingkatkan dan dipelihara	Belum meratanya Infrastruktur Penunjang pengembangan Kawasan (Perkotaan)	103	10303001	Drainase di kawasan perkotaan masih belum memadai	Internal	C	Meningkatnya Wilayah Rawan genangan	Dinas Pekerjaan Umum; Masyarakat	DPU
Ind Kegiatan				Panjang Drainase yang dibangun ditingkatkan dan dipelihara	kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase belum mencukupi kebutuhan penanganan kerusakan	103	10303001	Anggaran OP Drainase rendah; Pemanfaatan Drainase yang belum sesuai desain awal (drainase Jalan dimanfaatkan juga untuk drainase pemukiman)	Internal	C	Meningkatnya wilayah genangan	Kepala Dinas PU; Bidang Drakon, Masyarakat	DPU

Jenis	NO	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD
					Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
Sasaran		Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
Ind Sasaran				Kinerja pelayanan irigasi %									
Program		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)											
Ind Program				Persentase panjang irigasi dalam kondisi baik									
Kegiatan		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											
Ind Kegiatan				Persentase jaringan irigasi Primer dalam kondisi baik	Belum tercukupinya kebutuhan Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi	103	10303001	Kurang teliti, terbatasnya tenaga teknis/SDM yang ahli, dukungan sarpras yang kurang memadai, Overload pekerjaan.	Internal	C	Banyaknya kendala dalam pelaksanaan, Evaluasi, pelaporan	Kepala Dinas PU; Bidang SDAI, Masyarakat	DPU
Ind Kegiatan				Persentase jaringan irigasi Primer dalam kondisi baik	Operasi dan Pemeliharaan Irigasi kurang maksimal karena belum memenuhi AKNPI	103	10303001	Luas areal; ketersediaan anggaran; SDM	Internal	C	Produksi pertanian turun	Kepala Dinas PU; Bidang SDAI, Masyarakat	DPU
Ind Kegiatan				Persentase jaringan irigasi Primer dalam kondisi baik	Kurang optimalnya Rehabilitasi Jaringan Irigasi akibat Kerusakan jaringan tinggi, prioritas anggaran, SDM yang belum sesuai kebutuhan	103	10303001	Kerusakkan jaringan tinggi; prioritas anggaran; SDM	Internal	C	Produksi pertanian turun	Kepala Dinas PU; Bidang SDAI, Masyarakat	DPU
Ind Kegiatan				Persentase jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	Kurang optimalnya Rehabilitasi Jaringan Irigasi akibat Kerusakan jaringan tinggi, prioritas anggaran, SDM yang belum sesuai kebutuhan	103	10303001	Kerusakkan jaringan tinggi; prioritas anggaran; SDM	Internal	C	Produksi pertanian turun	Kepala Dinas PU; Bidang SDAI, Masyarakat	DPU
Ind Kegiatan				Persentase jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	Belum tercukupinya kebutuhan Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi	103	10303001	Kurang teliti, terbatasnya tenaga teknis/SDM yang ahli, dukungan sarpras yang kurang memadai, Overload pekerjaan.	Internal	C	Banyaknya kendala dalam pelaksanaan, Evaluasi, pelaporan	Kepala Dinas PU; Bidang SDAI, Masyarakat	DPU

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
16	Bangunan gedung pemerintah tidak terpelihara dengan baik	ROO.24	103	6	6	3,00	2,90	8,70
17	Terhambatnya pelaksanaan pekerjaan Fisik Jalan akibat kesalahan dalam tahapan perencanaan (Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan	ROO.24	103	6	6	2,80	2,80	7,84
18	Terbatasnya ketersediaan lahan untuk pembangunan/peningkatan jalan	ROO.24	103	6	6	2,80	2,90	8,12
19	Kurangnya Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan	ROO.24	103	6	6	2,80	2,80	7,84
20	Kurangnya jumlah peserta dalam pelatihan tenaga terampil dalam pelatihan / pembinaan Jasa konstruksi	ROO.24	103	6	6	2,90	2,80	8,12
21	Terhambatnya pelaksanaan kegiatan tata bangunan dan lingkungannya akibat kesalahan dalam tahapan perencanaan	ROO.24	103	6	6	2,70	2,70	7,29
22	Menurunnya kondisi jaringan jalan pada wilayah rawan bencana	ROO.24	103	6	6	3,10	3,10	9,61
23	Kejadian kecurangan di lapangan oleh kurangnya kompetensi SDM konstruksi dalam pelaksanaan pekerjaan	ROO.24	103	6	6	3,40	3,30	11,22
24	Persekongkolan antar sesama penyedia dalam mengikuti pemilihan penyedia barang/jasa.	ROO.24	103	6	6	3,50	3,40	11,90
25	Pekerjaan tidak sesuai kontrak /	ROO.24	103	6	6	3,60	3,40	12,24
26	Belum meratanya Infrastruktur Penunjang pengembangan Kawasan (Perkotaan)	ROO.24	103	6	6	3,30	3,30	10,89

**FORMULIR KERTAS KERJA
DAFTAR RISIKO PRIORITAS**

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	Belum tercukupinya kebutuhan Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	ROO.24	103	6	6	7,56	DPU	Data Masterplan Drainase yang ada perlu direview; Kurang teliti, terbatasnya tenaga teknis/SDM yang ahli, dukungan sarpras yang kurang memadai, Overload pekerjaan.	Banyak kendala dalam pelaksanaan, Evaluasi, pelaporan
2	Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan masih belum mampu mengurangi luas genangan	ROO.24	103	6	6	9,30	DPU	Lokasi pekerjaan Drainase yang disurvei tidak sesuai dengan lokasi yang diusulkan masyarakat	Meningkatnya wilayah genangan
3	kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase belum mencukupi kebutuhan penanganan kerusakan	ROO.24	103	6	6	9,30	DPU	Anggaran OP Drainase rendah; Pemanfaatan Drainase yang belum sesuai desain awal (drainase Jalan dimanfaatkan juga untuk drainase pemukiman)	Meningkatnya wilayah genangan
4	Belum tercukupinya kebutuhan Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup dalam pengelolaan Infrastruktur SDA	ROO.24	103	6	6	7,83	DPU	Kurang teliti, terbatasnya tenaga teknis/SDM yang ahli, dukungan sarpras yang kurang memadai, Overload pekerjaan.	Banyaknya kendala dalam pelaksanaan, Evaluasi, pelaporan
5	Terhambatnya pelaksanaan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya karena tidak tersedia lahan	ROO.24	103	6	6	9,61	DPU	Tidak tersedia lahan	Menurunnya ketersediaan Air baku
6	Terhambatnya Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing akibat Cuaca ekstrem, lokasi hasil survey tidak sesuai usulan, tumpang tindih kewenangan	ROO.24	103	6	6	9,30	DPU	Cuaca ekstrem; lokasi hasil survey tidak sesuai usulan; tumpang tindih kewenangan	Terjadinya bencana longsor
7	Peran / dukungan Kelembagaan Pengelola SDA masih kurang	ROO.24	103	6	6	8,10	DPU	Minimnya komunikasi antara lembaga pengelola SDA dari pihak masyarakat dengan pengelola SDA dari pemerintah	Partisipasi masyarakat rendah
8	Belum tercukupinya kebutuhan Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi	ROO.24	103	6	6	7,56	DPU	Kurang teliti, terbatasnya tenaga teknis/SDM yang ahli, dukungan sarpras yang kurang memadai, Overload pekerjaan.	Banyaknya kendala dalam pelaksanaan, Evaluasi, pelaporan

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
9	Kurang optimalnya Rehabilitasi Jaringan Irigasi akibat Kerusakan jaringan tinggi, prioritas anggaran, SDM yang belum sesuai kebutuhan	ROO.24	103	6	6	9,30	DPU	Kerusakkan jaringan tinggi; prioritas anggaran; SDM	Produksi pertanian turun
10	Operasi dan Pemeliharaan Irigasi kurang maksimal karena belum memenuhi	ROO.24	103	6	6	9,00	DPU	Luas areal; ketersediaan anggaran; SDM	Produksi pertanian turun
11	Belum tercukupinya kebutuhan Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi	ROO.24	103	6	6	8,12	DPU	Kurang teliti, terbatasnya tenaga teknis/SDM yang ahli, dukungan sarpras yang kurang memadai, Overload pekerjaan.	Banyaknya kendala dalam pelaksanaan, Evaluasi, pelaporan
12	Kurang optimalnya Rehabilitasi Jaringan Irigasi akibat Kerusakan jaringan tinggi, prioritas anggaran, SDM yang belum sesuai kebutuhan	ROO.24	103	6	6	9,92	DPU	Kerusakkan jaringan tinggi; prioritas anggaran; SDM	Produksi pertanian turun
13	Operasi dan Pemeliharaan Irigasi kurang maksimal karena belum memenuhi	ROO.24	103	6	6	9,00	DPU	Luas areal; ketersediaan anggaran; SDM	Produksi pertanian turun
14	Terhambatnya pelaksanaan pekerjaan Fisik Bangunan Gedung akibat kesalahan dalam tahapan perencanaan (Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Serta Perencanaan Teknis)	ROO.24	103	6	6	7,84	DPU	Kurang teliti, terbatasnya tenaga teknis/SDM yang ahli, dukungan sarpras yang kurang memadai, Overload pekerjaan.	Banyaknya kendala dalam pelaksanaan, Evaluasi, pelaporan
15	Kurang optimalnya Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	ROO.24	103	6	6	8,70	DPU	Adanya pelimpahan tugas Penetapan nilai retribusi daerah dilakukan oleh Dinas Teknis dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum, dari yang sebelumnya dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Banyumas	Terhambatnya layanan, karena adanya adaptasi terhadap pekerjaan baru
16	Bangunan gedung pemerintah tidak terpelihara dengan baik	ROO.24	103	6	6	8,70	DPU	Keterbatasan anggaran	Kerusakkan gedung meningkat

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
17	Terhambatnya pelaksanaan pekerjaan Fisik Jalan akibat kesalahan dalam tahapan perencanaan (Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan)	ROO.24	103	6	6	7,84	DPU	Kurang teliti, terbatasnya tenaga teknis/SDM yang ahli, dukungan sarpras yang kurang memadai, Overload pekerjaan.	Banyaknya kendala dalam pelaksanaan, Evaluasi, pelaporan
18	Terbatasnya ketersediaan lahan untuk pembangunan/peningkatan jalan	ROO.24	103	6	6	8,12	DPU	Lahan milik Pemda terbatas; Mayoritas jalan berada di antara lahan warga.	Mayarakat tertunda untuk mendapatkan layanan
19	Kurangnya Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan	ROO.24	103	6	6	7,84	DPU	kerusakan jalan tinggi dan sporadis; SDM (pengamat jalan) terbatas;	Kegiatan masyarakat terganggu
20	Kurangnya jumlah peserta dalam pelatihan tenaga terampil dalam pelatihan / pembinaan Jasa konstruksi	ROO.24	103	6	6	8,12	DPU	Kurangnya minat tenaga terampil untuk ikut pelatihan / pembinaan Jasa konstruksi yang diselenggarakan Dinas PU Kab. Banyumas	Banyak tenaga terampil konstruksi yang tidak memenuhi kualifikasi
21	Terhambatnya pelaksanaan kegiatan tata bangunan dan lingkungannya akibat kesalahan dalam tahapan perencanaan	ROO.24	103	6	6	7,29	DPU	Kurang teliti, terbatasnya tenaga teknis/SDM yang ahli, dukungan sarpras yang kurang memadai, Overload pekerjaan.	Banyak kendala dalam pelaksanaan, Evaluasi, pelaporan
22	Menurunnya kondisi jaringan jalan pada wilayah rawan bencana	ROO.24	103	6	6	9,61	DPU	Kondisi geografis; Cuaca ekstrem; Usia jalan	Proses evakuasi jika terjadi bencana menjadi terhambat
23	Kejadian kecurangan di lapangan oleh kurangnya kompetensi SDM konstruksi dalam pelaksanaan pekerjaan	ROO.24	103	6	6	11,22	DPU	kualitas SDM kontruksi (internal / eksternal)	kerugian Negara / Pemkab Banyumas dalam bentuk kualitas infrastruktur yang tidak layak
24	Persekongkolan antar sesama penyedia dalam mengikuti pemilihan penyedia barang/jasa.	ROO.24	103	6	6	11,90	DPU	Rasionalisasi harga, pekerjaan, kondisi sosial	Efisiensi anggaran menurun
25	Pekerjaan tidak sesuai kontrak / ketentuan	ROO.24	103	6	6	12,24	DPU	Kelemahan pengendalian; Tekanan eksternal; Tekanan ekonomi; Penyalahgunaan wewenang sebagai Pelaku PBJ	Kerugian negara
26	Belum meratanya Infrastruktur Penunjang pengembangan Kawasan (Perkotaan)	ROO.24	103	6	6	10,89	DPU	Drainase di kawasan perkotaan masih belum memadai	Meningkatnya Wilayah Rawan genangan

Formulir Kertas Kerja

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Banyumas						
Tahun Penilaian		: 2024						
Tujuan Strategis		: Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
Urusan Pemerintahan		: Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	Pekerjaan tidak sesuai kontrak / ketentuan		Pembinaan SDM konstruksi	E	Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas	Peningkatan kompetensi SDM Jasa Konstruksi; Pembuatan SOP pelaksanaan pekerjaan Fisik;	Kepala Bidang Drainase dan jasa Konstruksi	Triwulan IV 2024

RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian : 2024
Tujuan Strategis : Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Peningkatan kompetensi SDM Jasa Konstruksi; Pembuatan SOP pelaksanaan pekerjaan Fisik;	Rapat Internal Dinas Pekerjaan Umum; Grup WA Dinas Pekerjaan Umum; Medsos Dinas Pekerjaan Umum;	Kepala Dinas Pekerjaan Umum; Bidang Drainase dan Jasa Konstruksi;	Bidang Drainase dan Jasa Konstruksi; Masyarakat	Januari - Desember 2024		

RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian : 2024
Tujuan Strategis : Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penyusunan SK Struktur Risiko Dinas PU	Website Dinas Pekerjaan Umum	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum	Seluruh Karyawan Dinas Pekerjaan	Jan-24		
2	Penyusunan Satgas SPIP	Website Dinas Pekerjaan Umum	Kepala Dinas Pekerjaan Umum; Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum	Seluruh Karyawan Dinas Pekerjaan Umum	Jan-24		
3	Penyusunan Dokumen Review RTP	Website Dinas Pekerjaan Umum	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum	Seluruh Karyawan Dinas Pekerjaan	Jan-24		
4	Penyusunan RTP Tahun 2025 dilakukan sesuai ketentuan Perbup 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas	Website Dinas Pekerjaan Umum	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum	Triwulan IV Tahun 2024		

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP

□□□ □□P□□ d□

: Pemerintah Kabupaten Banyumas

□□□□□P□□□□□□□

: 2024

□□□□□□□□□□□□□

: Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

□r□□□□□P□□ □r□□□□□□□

: Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	k
1	Pekerjaan tidak sesuai kontrak / ketentuan	ROO.21.103.06.06					Peningkatan kompetensi SDM Jasa Konstruksi; Pembuatan SOP pelaksanaan pekerjaan Fisik;	Triwulan IV 2024		

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP

□□□ □P□□ d□
 □□□□□P□□□□□□
 □□□□□□r□□□□□□
 □r□□□□□P□□ □r□□□□□□□□

: Pemerintah Kabupaten Banyumas
 : **2024**
 : **Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
 : **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
a	b	c	d	e
1	Penyusunan SK Struktur Risiko Dinas PU	Mar-24		
2	Penyusunan Satgas SPIP	Mar-24		
3	Penyusunan Dokumen Review RTP	Jul-24		
4	Penyusunan RTP Tahun 2025 dilakukan sesuai ketentuan Perbup 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas	Triwulan IV		